

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP

AKTA YANG DIBUAT NOTARIS

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister

Kenotariatan Di Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH:

IRSAN SEPRIANATHA

NIM: 2320123018

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

(Irsan Seprianatha, 2320123018, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 132 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Notaris berwenang dalam membuat akta otentik sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang melekat pada Notaris dalam pembuatan akta otentik juga tidak akan lepas dari tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik wajib untuk berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah membuat Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dimana isi dari akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau Penggugat serta meminta majelis hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi) (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder digunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderteknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, teknik analisis data adalah analisis yuridis. Hasil Penelitian (1) Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata tanpa menyertakan UUJN merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif. Penggunaan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai payung hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dengan menyertakan UUJN dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat. Dengan menyertakan aturan yang bersifat khusus dalam hal ini UUJN, dapat memberikan pertimbangan hakim yang lebih relevan dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagai Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. (2) Notaris bertanggungjawab secara perdata terhadap pelanggaran yang dilakukannya dengan adanya Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang menyatakan bahwa Akta Nomor 344 yang dibuat oleh Tergugat sebagai Notaris dinyatakan batal disebabkan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Notaris juga dapat dijatuhi tanggung jawab secara pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran pemalsuan surat serta juga dapat diberikan tanggung jawab administrasi melalui Majelis Pengawas.

Kata Kunci : Analisis Yuridis; Tanggung Jawab; Notaris; Putusan Pengadilan Negeri dan Cibinong.

LEGAL ANALYSIS OF NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE DEEDS HE MAKES

(Case Study of Cibinong District Court Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

(Irsan Seprianatha, 2320123018, Master of Notary Program, Graduate Faculty of Law, Andalas University, 132 Pages, 2025)

ABSTRACT

Notaries are authorized to make authentic deeds as stated in Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notaries. The authority inherent in Notaries in making authentic deeds will also not be free from the Notary's responsibility for the deeds he makes. Notaries in exercising their authority in making authentic deeds are required to be guided by the Notary Office Law. In case Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, the Plaintiff sued the Defendant because the Defendant had made Deed Number 344 Concerning the Statement of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, where the contents of the deed were not in accordance with the wishes of the parties or the Plaintiff and asked the panel of judges to declare the Defendant to have committed an Unlawful Act (*onrechtmatigedaad*). Problem formulation: (1) How does the judge consider violations committed by a Notary in making authentic deeds? (Case study of the Cibinong District Court decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi) (2) What is the Notary's responsibility for deeds made by the Notary? (Case study of the Cibinong District Court decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi). The research method used is normative juridical, the type of data used in this study is secondary data, to obtain secondary data, primary legal material data sources and secondary legal materials are used, the data collection technique is literature study, the data analysis technique is juridical analysis. Research Results (1) The panel of judges' considerations in deciding that the Defendant had committed an Unlawful Act using Article 1365 of the Civil Code without including the UUJN is a less comprehensive consideration. The use of Article 1365 of the Civil Code as a legal umbrella for acts that result in losses for the parties by including the UUJN can provide clarity and legal certainty regarding the Unlawful Acts committed by the Defendant. By including specific regulations in this case the UUJN, it can provide judges' considerations that are more relevant to the problems faced related to the provisions, obligations, and prohibitions that have been violated by the Defendant as a Notary in exercising his authority. (2) The Notary is civilly liable for the violations he/she committed based on Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, which stated that Deed Number 344 made by the Defendant as a Notary was declared null and void due to differences in the contents of the deed with the wishes of the parties, resulting in losses for the parties. The Notary can also be held criminally liable if proven to have committed a violation of document forgery and can also be given administrative responsibility through the Supervisory Board.

Keywords: Legal Analysis; Responsibility; Notary; District Court Decision; and Cibinong.